

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan sebuah proses konstruktif dan ideal yang ditujukan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan adalah sebuah proses untuk membentuk generasi penerus sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat, memiliki karakter yang sesuai dengan harapan masyarakat. Pendidikan ditinjau dari isi merupakan sebuah proses enkulturasi budaya masyarakat serta membangun afeksi, peningkatan intelektual serta peningkatan keterampilan terutama pada kelompok generasi penerus. Pendidikan sebagai sebuah sistem yang dikembangkan dalam rangka mewujudkan tujuan untuk menghasilkan generasi yang berkualitas maka pendidikan memiliki hubungan dengan kehidupan masyarakat. Pendidikan merupakan pusat perubahan konstruktif (O'neil, 2008).

Upaya tersebut dinyatakan sebagai kewajiban mendasar negara dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kewajiban negara yang utama di bidang pendidikan dapat dilihat dalam pembukaan konstitusi negara Republik Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dijelaskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Mengenai penyelenggaraan pendidikan Freire (2009) mengemukakan bahwa pendidikan berorientasi kepada pengenalan realitas diri manusia dan diri sendiri. Proses pengenalan realitas dan diri sendiri dilakukan melalui refleksi terhadap diri dan lingkungannya serta berlangsung terus menerus. Manusia tidak

Rois Abdul Fatah, 2021

MODEL MANAJEMEN PENDIDIKAN KARAKTER SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BERBASIS BOARDING SCHOOL DITINJAU DARI ETHICAL LEADERSHIP, TEACHER CAPACITY BUILDING DAN SCHOOL CULTURE

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

akan mencapai pemahaman utuh mengenai hakekatnya karena keterbatasan manusia dalam berlogika. karena itu Freire (2010) mengungkapkan bahwa pendidikan holistik yaitu memadukan 3 jenis pendidikan kognitif, afeksi dan humanistik serta keterampilan. Mudyahardjo (2008) mengemukakan bahwa: “Baik dibatasi secara maha luas, sempit maupun luas terbatas, pendidikan tetap merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam kehidupan manusia yang berawal dari hal-hal yang bersifat aktual menuju hal-hal yang bersifat ideal”.

Salah satu tujuan pendidikan adalah membentuk karakter yang bersumber pada nilai-nilai kebangsaan. Pendidikan karakter diselenggarakan dengan tujuan membangun kesadaran terhadap makna nilai-nilai yang menjadi fondasi pendidikan karakter antara lain moral, bagaimana nilai-nilai tersebut, mengimplementasikannya sebagai praktek keseharian serta mendorong terbentuknya perilaku normatif yang didasarkan pada tujuan-tujuan abstrak yaitu menjadi manusia yang berkarakter.

Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) seperti dinyatakan dalam Kemdikbud (2013) dengan focus pada 5 nilai karakter bangsa yaitu Religius, Nasionalis, Mandiri, gotong royong dan integritas didasarkan pada perubahan pola berpikir dan cara bertindak. Guna mencapai tujuan pendidikan karakter sesuai dengan tujuan undang-undang maka pengelolaan pendidikan baik input, proses serta outputnya mengacu pada sistem tata kelola yang mengedepankan jaminan pencapaian tujuan yang berkelanjutan. Setiap praktek dan prinsip penyelenggaraan pendidikan karakter sebagai salah satu upaya sistematis menjaga agar proses pendidikan memiliki kualitas dan mengarah pada tujuan.

Hal ini seperti dinyatakan oleh Chou, Tu and dan Huang (2013) bahwa *“Morality and character is one of the most important tenets of education within the Confucianism context”*. Pendidikan karakter adalah sebuah proses pembentukan mental siswa agar sesuai dengan nilai-nilai luhur. Siswa pada tataran praktis melakukan praktek-praktek yang sesuai dengan nilai karakter kebangsaan dan secara filosofi diarahkan untuk memahami esensi dari nilai tersebut sesuai dengan konteks kehidupan sosialnya. Pendidikan karakter bisa

menjadi salah satu sarana pembudayaan dan pemanusiaan. Peran pendidikan karakter bukan saja bersifat integratif dalam arti mengukuhkan moral intelektual peserta didik, melainkan juga bersifat kuratif baik secara personal maupun sosial yakni bisa menjadi salah satu sarana penyembuh penyakit sosial (Koesoema, 2010).

Upaya untuk meningkatkan efektivitas pendidikan karakter tidak dapat dilepaskan dari telaah tentang pendidikan karakter dari sisi pengelolaan. Namun pada umumnya telaah pendidikan karakter lebih banyak pada model penyelenggaraan untuk tingkat kelas. Hough (2011) mengemukakan pentingnya pengelolaan pendidikan karakter di kelas. Pembinaan pendidikan karakter berbasis kelas memberikan nilai tambah terhadap implementasi program serta hasil belajar mengajar pendidikan karakter. Tingkat implementasi program di sekolah ditunjukkan dengan meningkatnya kehadiran dan peningkatan perilaku, kehadiran, dan prestasi siswa. Sobarna & Hakim (2018) menjelaskan permasalahan dalam penyelenggaraan dan implementasi pendidikan karakter. tata kelola pendidikan karakter yang terintegrasi dalam pembelajaran melalui pengembangan habituasi dan spesialisasi serta pengembangan tema pembelajaran di tingkat dasar. Perencanaan program pendidikan karakter yang terintegrasi dalam perencanaan mingguan (RKM) dan perencanaan harian (RKH) berada di level kelas. Sistem pendidikan karakter yang diterapkan lebih operasional tertimbang strategis.

Lebih lanjut Abdi (2018) menunjukkan model pendidikan karakter berdasarkan konsep yang dikemukakan Lickona, Schaps, & Lewis (1995), menurut Lickona (1991) pendidikan karakter adalah upaya yang disengaja untuk membantu orang mengerti, peduli, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai etis. Lickona (1991) menekankan dalam pendidikan karakter tentang kemampuan untuk menilai apa yang benar (nilai moral), peduli tentang apa yang benar (sikap moral), dan melakukan apa yang diyakini benar (perilaku moral), bahkan ketika menghadapi tekanan eksternal dan godaan dari internal

Pendidikan karakter dan penyelenggaraannya menjadi fokus perhatian. Penyelenggaraan dan tata kelola pendidikan karakter baik secara formal maupun di keluarga atau lingkungan masyarakat tidak mudah. Faktanya penyelenggaraan pendidikan karakter lebih banyak diserahkan kepada guru atau wali kelas pengampu mata pelajaran Pkn atau guru agama. Pengembangan pendidikan karakter terbatas pada mata pelajaran yang langsung berkaitan dengan pendidikan karakter, kondisi tersebut menyebabkan upaya untuk membentuk karakter sesuai tujuan pendidikan nasional kurang efektif.

Realitas dunia pendidikan saat ini masih didominasi oleh cerita-cerita buram penuh kekerasan. Laporan yang dikeluarkan oleh UNESCO pada bulan Oktober 2018 dalam *Global school-based Student Health Survey (GSHS)* menunjukkan bahwa 16.1% anak-anak pernah menjadi korban perundungan secara fisik. Fenomena serupa juga terjadi di Indonesia. Perundungan juga merupakan persoalan serius dan mengancam bagi anak Indonesia, misalnya tawuran antar pelajar.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Unicef (2017) memaparkan hasil survei oleh *The Global School-Based Health Survey* yang menunjukkan bahwa 32% siswa-siswi usia 13 sampai 17 tahun di Indonesia telah mengalami kekerasan fisik dan 20% siswa-siswi menjadi korban perundungan di sekolah. Pada tahun 2018, KPAI menerima 161 laporan kasus perlindungan anak, di mana 36 kasus (22.4%) adalah kasus korban perundungan dan 41 kasus (25.5%). Rekomendasi KPAI (2018) terhadap provinsi Jawa Barat menunjukkan perlunya peningkatan keamanan lingkungannya termasuk perlindungan terhadap anak. Anak memerlukan perlindungan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakter yang menggambarkan nilai-nilai inti dalam masyarakat.

Focus utama pada perubahan pola berpikir dan cara bertindak seperti dituangkan dalam Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Pola berpikir dan bertindak sesuai nilai-nilai yang melandasinya mengalami tantangan dan hambatan. Konstruksi rasio para siswa dalam mengargumentasikan penalaran moral dalam tindakan dan pilihan karakter tergantung pada guru, sistem maupun

Rois Abdul Fatah, 2021

MODEL MANAJEMEN PENDIDIKAN KARAKTER SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BERBASIS BOARDING SCHOOL DITINJAU DARI ETHICAL LEADERSHIP, TEACHER CAPACITY BUILDING DAN SCHOOL CULTURE

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

keluarga. Kemandirian dalam berargumentasi terkait pilihan moral masih lemah. Kemampuan siswa dalam memahami dan melakukan penalaran moral terhadap pilihan karakter masih lemah. Data OECD (2020) menegaskan bahwa penalaran karakter oleh siswa di Indonesia Artinya terdapat permasalahan yang berkaitan dengan *out put* dari penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah. Tingkat disiplin, kemampuan mengemukakan argumentasi moral dalam tindakan, maupun kepekaan terhadap etika dan tanggung jawab moral masih kurang. Para siswa mengalami kesulitan untuk menimbang secara etika tentang tindakan benar dan salah. Pada umumnya para siswa lebih banyak mengikuti perilaku bermoral berdasarkan alasan takut, mengikuti aturan atau sesuai dengan keinginan orang tua maupun guru.

Menurut data UNICEF (2020) terjadi penyalahgunaan zat, khususnya dalam bentuk merokok dan konsumsi alkohol sebagai masalah yang meluas di kalangan remaja Indonesia, terutama lelaki. Lebih dari separuh (55,3 persen) remaja lelaki usia 15–19 menyatakan mereka mengonsumsi tembakau setiap hari dan 15,5 persen mengonsumsinya sesekali. Hasil survei terbaru terhadap anak sekolah usia 13–17 tahun di Indonesia menyoroti kesehatan jiwa sebagai isu utama yang dirasakan remaja (UNICEF, 2020). OECD (2020) menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan kemampuan siswa memahami dan menghayati perspektif orang lain yang rendah. Ada masalah terkait dengan pilihan tindakan tindakan bermoral dikalangan remaja termasuk bagaimana menghargai orang lain. Artinya pemahaman, penalaran dan aplikasi perilaku berkarakter yang didasarkan pada nilai-nilai utama seperti kemandirian dalam penalaran moral masih kurang. Beberapa negara dengan skor rendah lainnya yaitu Brunei Darussalam, Kazakhstan, Maroko, Panama, Filipina, dan Thailand seperti dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 1. 1 Tingkat kemampuan siswa dalam pemahaman, penalaran dan aplikasi yang menunjukkan rasa hormat siswa terhadap budaya lain (OECD (2020))

Terendah		Tertinggi	
Thailand	-0.55	Kolombia	19.374
Indonesia	-0.35	Kanada	18.13
Maroko	-0.29	Skotlandia	16.2
Brunei Darussalam	-0.23	Spanyol	12.71
Kazakhstan	-0.22	Israel	11.61
Philipina	-0.10	Yunani	9.59
Panama	-0.07	Negara OECD	4.04

Sumber : OECD (2020)

Hasil survey OECD (2020) menempatkan siswa di Indonesia memiliki kepekaan rendah mengenai isu-isu global seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan maupun masalah-masalah HAM (Hak Azasi Manusia) sebagai bentuk cerminan dari penalaran karakter. Ditegaskan lemahnya kemandirian tersebut dapat dilihat dari praktek dan tata kelola proses pembelajaran di sekolah

Sekolah menengah pertama sebagai bagian dari sistem pendidikan untuk membentuk karakter para remaja menghadapi tantangan. BPS (2019) mengemukakan upaya yang dilakukan belum dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang menumbuhkan kecakapan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*). Lembaga pendidikan sebagai tempat untuk membentuk karakter siswa mengalami penurunan minat yang dilihat dari angka APK (Angka Partisipasi Kasar) 2019. Dalam kurun waktu lima tahun yang dihitung sejak tahun 2015, pergerakan APK pada jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat cenderung mengalami penurunan. SMP sebagai salah satu lembaga yang membentuk karakter siswa mengalami penurunan minat. Kondisi tersebut akan menghambat upaya pemerintah dalam pembentukan karakter melalui pendidikan formal SMP. BPS (2020) menegaskan secara umum, tingkat pendidikan mempengaruhi perilaku. Semakin tinggi pendidikan, masyarakat cenderung semakin anti korupsi. Menurunnya angka partisipasi kasar dalam pendidikan sebagai fenomena menurunnya perilaku remaja yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Rois Abdul Fatah, 2021

MODEL MANAJEMEN PENDIDIKAN KARAKTER SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BERBASIS BOARDING SCHOOL DITINJAU DARI ETHICAL LEADERSHIP, TEACHER CAPACITY BUILDING DAN SCHOOL CULTURE

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Proses untuk pembentukan karakter di sekolah mengalami hambatan. Menurut statistik pendidikan (2019) bahwa masih banyak siswa yang bersekolah tetapi juga dilibatkan dalam kegiatan ekonomi sebagai pekerja. Kondisi tersebut meningkatkan beban siswa dan menghambat fokus siswa dalam pembelajaran termasuk untuk pembentukan karakter. Sesuai dengan data tersebut 7 dari 100 siswa usia 10-24 tahun bekerja selama seminggu terakhir seperti dapat dilihat pada data berikut:

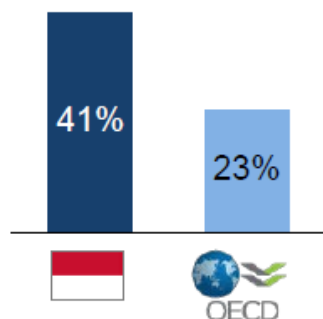


Sumber : Susenas Maret 2019

Gambar 1. 1 Persentase siswa yang bekerja di usia 10-24 tahun

Sesuai dengan data tersebut, persentase siswa di perkotaan yang bekerja sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan siswa di perdesaan (7,60 persen berbanding 6,46 persen). Jika dilihat dari jenis kelamin, persentase siswa laki-laki yang bekerja lebih besar (8,23 persen) dibandingkan siswa perempuan yang bekerja (5,98 persen). Keterlibatan para siswa dalam bekerja perlu mendapatkan perhatian mengingat hubungannya dengan efektivitas penyelenggaraan pendidikan karakter.

Perundungan (% siswa; 2018)



41% siswa Indonesia dilaporkan mengalami perundungan beberapa kali dalam sebulan (vs. 23% rata-rata OECD)

Siswa yang sering mengalami perundungan memiliki skor 21 poin lebih rendah dalam membaca¹, merasa sedih, ketakutan, dan kurang puas dengan hidupnya. Mereka juga memiliki kecenderungan membolos sekolah

Sumber: OECD/ PISA, Kearney 2020

Gambar 1. 2 Persentase perundungan menurut OECD

Menurut Data OECD (2020) bahwa di Indonesia, 41% siswa melaporkan mengalami *bullying* setidaknya beberapa kali dalam sebulan, dibandingkan dengan 23% rata-rata di seluruh negara OECD. Pada saat yang sama, 80% siswa di Indonesia (dan 88% dari rata-rata siswa di seluruh negara OECD) setuju atau sangat setuju bahwa membantu siswa yang tidak bisa membela diri adalah hal yang baik. Sekitar 25% siswa di Indonesia (rata-rata OECD: 26%) melaporkan bahwa, dalam setiap atau sebagian besar pelajaran bahasa pengantar, guru mereka harus menunggu lama sampai siswa tenang. Di Indonesia, siswa melaporkan bahwa dalam setiap pelajaran, guru harus menunggu lama untuk menenangkan siswa. Dari rata-rata di seluruh negara OECD, 21% siswa telah membolos satu hari sekolah dan 48% siswa datang terlambat ke sekolah dalam dua minggu. Di Indonesia, 21% siswa pernah bolos sekolah sehari dan 52% siswa datang terlambat ke sekolah selama periode itu. Di sebagian besar negara dan ekonomi, siswa yang sering diintimidasi lebih cenderung bolos sekolah, sedangkan siswa yang menghargai sekolah, menikmati iklim disiplin yang lebih baik dan menerima emosi yang lebih besar dukungan dari orang tua cenderung tidak membolos sekolah.

Permasalahan Implementasi pendidikan untuk karakter di tingkat SMP dan keterlibatan siswa dalam proses pendidikan menunjukkan adanya kesenjangan antara proses pendidikan karakter yang terjadi dengan harapan. Kemampuan

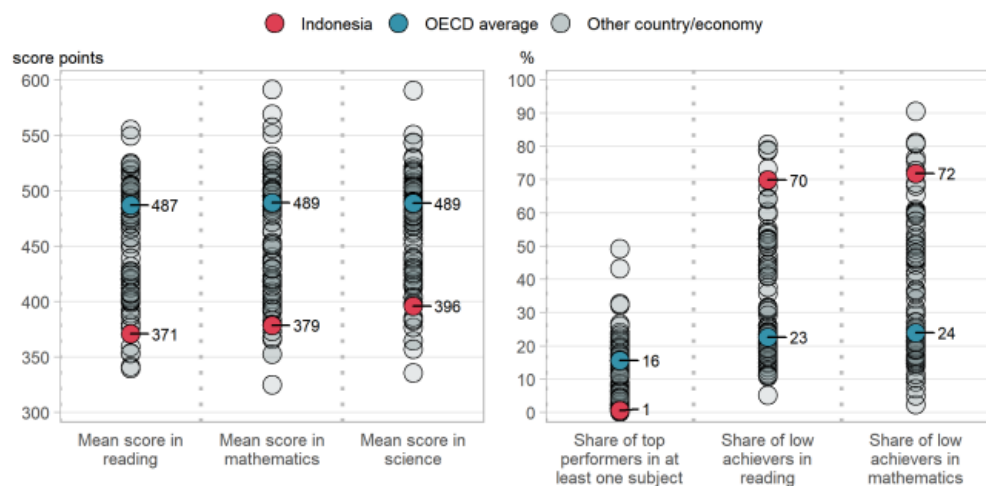
Rois Abdul Fatah, 2021

MODEL MANAJEMEN PENDIDIKAN KARAKTER SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BERBASIS BOARDING SCHOOL DITINJAU DARI ETHICAL LEADERSHIP, TEACHER CAPACITY BUILDING DAN SCHOOL CULTURE

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kompetensi siswa di tingkat global sesuai dengan *Programme for International Student Assessment (PISA)* tahun 2018 masih rendah. Salah satu perhatian yaitu terkait karakter yang dinilai memiliki tingkat kepentingan yang sama secara global. Salah satu upaya untuk mengukur aspek non kognitif untuk memperoleh gambaran karakter siswa menunjukkan perlu adanya strategi yang berorientasi pada perubahan tersebut (OECD, 2019).

Skor rendah para siswa di Indonesia adalah tentang reasoning dan argument (dimensi yang mencerminkan *fundamental mathematical capabilities*). Kemampuan yang melibatkan pemikiran proses logis yang mengeksplorasi dan menghubungkan elemen masalah untuk membuat kesimpulan, mengevaluasi pembenaran yang diberikan, dan memberikan pembenaran dan solusi untuk masalah masih lemah, seperti dapat dilihat pada gambar hasil evaluasi terhadap siswa usia 15 tahun di Indonesia sebagai berikut:



Sumber: PISA Survei 2019

Gambar 1.3 Kemampuan siswa Indonesia berdasarkan hasil survei PISA (*Programme for International Student Assessment*)

Berdasarkan data tersebut salah satu skor *fundamental mathematical capabilities* yaitu reasoning dan argument 379 artinya jauh di bawah rata-rata Negara-negara OECD yaitu 489. Di Indonesia, sekitar 1% siswa mendapat nilai di Level 5 atau lebih tinggi dalam matematika (rata-rata OECD: 11%). Enam

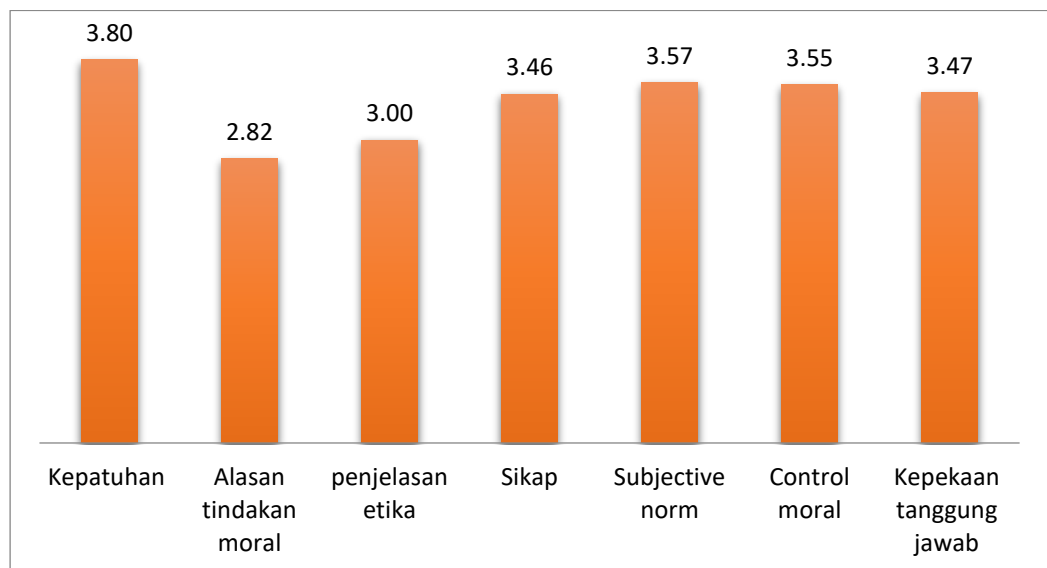
Rois Abdul Fatah, 2021

MODEL MANAJEMEN PENDIDIKAN KARAKTER SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BERBASIS BOARDING SCHOOL DITINJAU DARI ETHICAL LEADERSHIP, TEACHER CAPACITY BUILDING DAN SCHOOL CULTURE

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

negara dan ekonomi Asia memiliki jumlah siswa terbesar yang melakukannya: Beijing, Shanghai, Jiangsu dan Zhejiang (Tiongkok) (44%), Singapura (37%), Hong Kong (Tiongkok) (29%), Makau (Tiongkok) (28%), Tionghoa Taipei (23%) dan Korea (21%). Para siswa mampu mencontohkan situasi yang kompleks secara matematis, mengemukakan argument dan reasoning, dapat memilih, membandingkan, serta mengevaluasi strategi pemecahan masalah yang sesuai.

Terkait dengan *reasoning* dan *argument* yang melibatkan pemikiran proses logis proses seperti mengevaluasi pembenaran, memberikan pembenaran pernyataan atau solusi untuk masalah. Hasil pra survey terhadap karakter siswa para siswa di Jawa barat yang dilakukan secara terbatas yaitu pada siswa di SMP *Boarding School* menunjukkan kemampuan mengargumentasikan moral berada pada tingkat kurang seperti dapat dilihat pada tabel berikut:



Sumber: Hasil survey terhadap siswa di SMP *Boarding School* di Jawa barat

Gambar 1. 4 Gambaran character siswa SMP *Boarding School* di Jawa barat

Hasil survey menunjukkan bahwa meskipun para siswa memiliki kepatuhan terhadap perilaku bermoral yang cukup tinggi berdasarkan skala penilaian 1 s.d 5 dengan skor 3.80. Kemampuan mengargumentasikan tindakan moral (2.82), menjelaskan alasan tindakan yang dapat dibenarkan secara moral (3.00) atau

Rois Abdul Fatah, 2021

MODEL MANAJEMEN PENDIDIKAN KARAKTER SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BERBASIS BOARDING SCHOOL DITINJAU DARI ETHICAL LEADERSHIP, TEACHER CAPACITY BUILDING DAN SCHOOL CULTURE

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

berada pada kategori kurang. Para siswa memiliki sikap positif terhadap nilai-nilai karakter, *subjective norm*, control perilaku moral yang cukup serta memiliki kepekaan tanggung jawab moral pada orang lain dan lingkungan. Pilihan untuk menunjukkan karakter baik lebih banyak disebabkan oleh aturan, perintah guru, aturan agama, bukan atas kemampuan logika dalam beretika terhadap ujaran-ujaran moralitas dalam agama maupun dalam peraturan yang dirumuskan oleh sekolah. Kondisi tersebut menjadi masalah utama yang diidentifikasi berdasarkan hasil survey yaitu lemahnya kemampuan untuk mengargumentasikan pendapat berdasarkan pengetahuan mengenai etika (refleksi kritis terhadap ujaran, moralitas berdasarkan teori etika).

Mengacu pada Habermas (1971) mengenai pilihan moral sebagai pilihan emancipatoris, pilihan moral berdasarkan hasil dari kegiatan refleksi diri yaitu intuisi sekaligus emansipasi, pemahaman sekaligus melepaskan diri dari ketergantungan dogmatis. Proses pembelajaran tentang perilaku moral belum sepenuhnya membimbing refleksi diri yang bersifat konstitutif baik bagi pengetahuan maupun bagi praksis. Pikiran tentang moral dalam karakter belum sepenuhnya menunjukkan kehendak berpikir dalam diri siswa. Kritik terhadap peran agama yang dikemukakan Habermas (1981) bahwa agama diharapkan kembali pada peran dan fungsinya dalam memberi sumbangan atau berkontribusi pada upaya mewujudkan masyarakat yang reseptif pada ruang-ruang diskursif rasional yang pada gilirannya akan memungkinkan proses emansipasi kemanusiaan. Diskursus tersebut jarang terjadi dalam sistem persekolahan *boarding school*. Para siswa belum belajar mengartikulasikan intuisi moral (dan substantif) dalam karakter seperti disiplin, tanggung jawab secara komunikatif rasional akibat proses belajar yang lemah dalam diskursus moral secara kritis. Huhtala & Holma (2019) mengemukakan adanya masalah tentang adanya kemampuan rasional dalam perkembangan moral. Komunikasi dan kompetensi para siswa untuk mengargumentasikan pilihan moral sebagai hambatan bagi pilihan moral.

Skor PISA dan hasil pra survey secara terbatas menunjukkan adanya kelemahan para siswa SMP di Indonesia dalam mengargumentasikan tindakan benar. Kondisi tersebut dipengaruhi beragam faktor. Bajovic et al (2009) menyoroti masalah implementasi pendidikan karakter antara lain: kurangnya kejelasan dalam mendefinisikan 'karakter', kurangnya pengakuan akan pentingnya kognitif dan social proses dalam pengembangan moral, dan kurangnya kejelasan dalam strategi yang efektif untuk pengembangan karakter.

Hasil penelitian Klaus dan Kriegsman (Megawangi, 2004 : 6) tampak masih relevan dengan kondisi di Jawa Barat, disampaikan bahwa Indonesia memiliki kredibilitas yang rendah dalam masalah karakter. Borualogo dan Gumilang (2019) mengemukakan angka kejadian perundungan di Jawa Barat tergolong tinggi dan memprihatinkan. Persoalan pendidikan karakter seperti dikemukakan oleh Likona (1996) tampaknya masih relevan. Persoalan tersebut antara lain: 1). Meningkatnya kekerasan di kalangan remaja 2). Meningkatnya ketidakjujuran, penipuan, dan pencurian). 3) Angka rasa tidak hormat yang lebih besar terhadap orang tua, guru, dan otoritas sah lainnya 4). *Bullying* teman sebaya. 5). Adanya peningkatan fanatisme dan kejahatan rasial. 6). Kemunduran etika berbahasa. 7). Penurunan etika kerja. 8). Meningkatnya egoisme, disertai dengan kemunduran pribadi dan kewarganegaraan tanggung jawab. 9). munculnya gelombang perilaku merusak diri sendiri seperti aktivitas seksual prematur, penyalahgunaan zat dan bunuh diri. 10). Tumbuhnya buta huruf pada masalah etis, termasuk ketidaktahuan tentang pengetahuan moral yang mendasar serta kecenderungan untuk terlibat dalam perilaku yang merugikan diri sendiri atau yang lain tanpa berpikir bahwa tindakan tersebut salah secara moral.

Pengelolaan pendidikan karakter di sekolah cukup kompleks. Program pendidikan karakter jarang menekankan kerangka moral di mana karakter dikembangkan tetapi lebih merupakan campuran arsitektur konstruksi behavioris dan sosial kognitif (Berkowitz, & Grych, 1998). Pendidikan karakter lebih fokus pada prestasi akademik dibandingkan dengan penekanan pada karakter yang dibentuk melalui proses pendidikan karakter. Implementasi pendidikan karakter

yang kurang efektif patut diduga sebagai salah satu penyebab kurangnya kemampuan siswa dalam mengargumentasikan pilihan moral.

Hasil pra survey (2020) menunjukkan, seberapa besar skor capability, capacity, potensi, kontribusi berada pada kategori kurang. Kemampuan kerja (praktik material), integrasi pendidikan karakter kedalam konteks kehidupan di sekolah, masyarakat masih kurang. Meskipun sekolah memiliki sumber daya social berupa dukungan dari orang tua siswa, lembaga penyantun namun kemampuan untuk melibatkan pihak eksternal dalam aksi kolektif masih kurang. Peran guru, pengaturan, dan distribusi sumber daya termasuk gagasan untuk pengembangan ide pendidikan karakter masih terbatas pada kelompok guru PKn, pendidikan agama maupun wakil kepala sekolah bidang kesiswaan.

Mengacu pada data OECD (2020) bahwa faktor penting untuk mewujudkan skor PISA adalah guru dan kepala sekolah. Penekanan tugas guru yaitu pada pengembangan profesional, keyakinan dan sikap guru dalam mengajar, dan praktik pengajaran yang dilakukan. Proses interaksi/ hubungan terstruktur pimpinan dan guru sebagai bawahan dalam implementasi pendidikan karakter masih centralistic. Menurut BPS (2019) bahwa meningkatnya persentase guru layak mengajar tentunya belum cukup mampu mengukur bagaimana kualitas tenaga pengajar. Selain kualitasnya, beban kerja guru juga turut mempengaruhi bagaimana kualitas proses belajar mengajar di dalam kelas. Beban kerja guru tersebut dapat dilihat dengan menghitung rasio murid-guru yang menggambarkan jumlah murid terhadap jumlah guru.

Mekanisme kontrol dan gangguan terhadap penyelenggaraan pendidikan karakter bersifat *centralistic*. Komitmen dan ekspresi kolektif yang cukup tinggi belum diikuti aksi sosial kolektif, terkoordinasi, dan kooperatif sebagai mekanisme sosial yang mengarah pada pengorganisasian struktur dan norma sosial yang mendukung penyelenggaraan pendidikan karakter. Implementasi pendidikan karakter sangat tergantung pada individu dan kepala sekolah sebagai pimpinan. Connolly et al (2017) menjelaskan persoalan kepemimpinan di lembaga pendidikan. Kepemimpinan di lembaga pendidikan idealnya dilakukan

Rois Abdul Fatah, 2021

MODEL MANAJEMEN PENDIDIKAN KARAKTER SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BERBASIS BOARDING SCHOOL DITINJAU DARI ETHICAL LEADERSHIP, TEACHER CAPACITY BUILDING DAN SCHOOL CULTURE

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

secara bertanggung jawab. Secara praktis, tindakan pimpinan tidak selalu menunjukkan tanggung jawab agar sistem pendidikan berfungsi efektif serta pengorganisasian di lembaga pendidikan lebih banyak diabaikan. Menurut data BPS (2019) bahwa seorang kepala sekolah sering kali tidak terlibat langsung dalam proses belajar mengajar dan bertatap muka langsung dengan murid seperti layaknya guru kelas. Interaksi antara kepala sekolah dengan siswa sebagai bagian penting dari proses pembelajaran sulit diwujudkan.

Keberhasilan pendidikan karakter sulit diwujudkan di tengah perubahan lingkungan yang sangat cepat. Benninga, Berkowitz, Kuehn, & Smith (2006) mengidentifikasi lingkungan dan hubungannya dengan program pendidikan karakter yang efektif. Terdapat Pergeseran nilai-nilai dalam sistem masyarakat, pendidikan keluarga, kelompok bermain serta arus informasi dalam pergaulan yang semakin modern yang mempengaruhi karakter anak. Penyelenggaraan manajemen pendidikan karakter menghadapi kendala pada *level* sistem antara lain kurang efektifnya fungsi kepemimpinan, SDM yaitu guru serta budaya yang menopang beroperasinya sistem manajemen karakter.

Sejalan dengan hasil penelitian Fatah et al., (2020) yang mengemukakan mengenai implementasi pendidikan karakter yang perlu perbaikan secara sistem (tata kelola) termasuk peran kepala sekolah serta guru. Interaksi siswa, guru dengan pimpinan sekolah belum dijadikan sebagai bagian dari proses pembelajaran karakter. Pimpinan SMP kurang efektif mendorong dan menjadikan dirinya sebagai contoh karakter akibat kurangnya interaksi dengan siswa. Kemampuan manajerial kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan karakter diperlukan. Selain sebagai role model, kepala sekolah perlu menunjukkan diri melalui interaksi sosial sebagai sumber pengetahuan baik bagi guru maupun sekolah dalam mengidentifikasi nilai-nilai karakter dan mentransmisikannya di dalam kelas melalui proses yang terencana.

Kepala sekolah belum banyak memiliki peran untuk mengorganisasikan tanggung jawab dan dukungan sumber daya untuk penyelenggaraan pendidikan karakter baik dalam kegiatan akademik maupun non akademik termasuk

mendorong kapasitas guru untuk penyelenggaraan pendidikan karakter. Begley dan Johansson (2003) mengemukakan peran kepala sekolah di tengah konflik nilai yang menjadi ciri khas peran kepemimpinan sekolah. Pekerjaan para pemimpin di lembaga pendidikan menjadi lebih kompleks, jauh lebih mudah diprediksi, kurang terstruktur, dan lebih sarat konflik. Lu (2014) menjelaskan sebelumnya bahwa ada kebutuhan pemimpin etis dalam tata kelola organisasi public, hasil penelitian di dunia bisnis mengenai peran kepemimpinan etis diperlukan untuk mendorong berkembangnya kepemimpinan etis di tengah isu korupsi yang terjadi di lembaga publik. Skandal etika baru-baru ini dalam bisnis dan pemerintah telah menimbulkan pertanyaan penting tentang peran kepemimpinan dalam membentuk perilaku etis.

Terdapat tekanan sosial yang cukup besar untuk meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang signifikan dalam organisasi sekolah. Adanya tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ras, etnis dan kesetaraan gender menjadikan pendidikan karakter sebagai proses penting yang memerlukan dukungan pemimpin etis. Selain itu perlunya keterampilan bagi guru maupun staff akademik yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah.

Masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah menurut Narpaez dan Lapsley (2004) yaitu adanya dilema yang dihadapi pendidik guru adalah apakah pendidikan karakter tetap menjadi bagian dari kurikulum tersembunyi sekolah atau apakah tetap ada advokasi untuk komitmen nilai. Untuk pendidikan dan pengajaran harus transparan, disengaja, dan bersifat terbuka publik. Setiap mata ajar belum sepenuhnya terbuka tentang konten pendidikan karakter dan lebih fokus pada konten disiplin ilmu masing-masing. Padahal setiap ilmu pengetahuan yang memiliki nilai-nilai karakter. Para pendidik belum dilengkapi dengan kapasitas untuk menjelaskan nilai-nilai karakter dalam disiplin ilmu yang diajarkannya. Tugas sebagai pendidik pendidikan karakter lebih banyak diserahkan kepada guru PKn. Kapasitas guru dalam memfasilitasi

Rois Abdul Fatah, 2021

MODEL MANAJEMEN PENDIDIKAN KARAKTER SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BERBASIS BOARDING SCHOOL DITINJAU DARI ETHICAL LEADERSHIP, TEACHER CAPACITY BUILDING DAN SCHOOL CULTURE

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pendidikan karakter masih kurang. Pada umumnya pendidikan karakter lebih banyak diselenggarakan oleh guru PKn.

Persoalan lemahnya kemampuan argumentasi dan alasan siswa yang menunjukkan karakter bersumber pada persoalan sistem serta tata kelola. Upaya untuk mewujudkan pendidikan karakter sesuai dengan tujuan memerlukan dukungan sistem tata kelola yang memadai. Tujuan seperti di kemukakan Sing (2019) yaitu untuk pengembangan karakter kebajikan diperlukan tata kelola yang efektif. Berkowitz dan Grych (1998) yang mengidentifikasi fungsi pendidikan karakter yaitu orientasi sosial, kontrol diri, kepatuhan, dan harga diri, empati, hati nurani, argumentasi moral, dan altruism maupun perilaku prososial atau berfungsi untuk meningkatkan resistensi terhadap perilaku negative. Masaong (2013) menegaskan 80% prestasi kerja ditentukan oleh soft skill (karakter) dan hanya 20% *hard skill* (pengetahuan dan keterampilan. Mc Grath (2018) memerlukan tata kelola mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi.

Sistem tata kelola pendidikan karakter tersebut memiliki fungsi untuk mendorong bekerjanya individu dalam organisasi guna mencapai tujuan pendidikan karakter secara efektif dan efisien. Sistem tersebut mengarahkan agar fungsi-fungsi organisasi seperti perencanaan, pengorganisasian sumber daya, aktualisasi dan evaluasi berjalan sebagai sistem yang terus beroperasi agar lebih efektif dan efisien. Faktanya sistem tata kelola tersebut tidak banyak ditelaah.

Pendapat Cline, & Necochea, (1996) tampaknya masih relevan bahwa masalah yang terkait dengan program pendidikan karakter terkait dengan tidak konsisten dan, kadang-kadang, manifestasi nilai-nilai yang ditampilkan bertentangan dari nilai-nilai universal, karena norma-norma yang dapat diterima dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai ini sangat bervariasi. Selain itu manifestasi nilai-nilai universal yang dapat diterima yaitu nilai-nilai yang hanya mencerminkan konsensus perilaku masyarakat yang sesuai untuk kelompok. Pelanggaran nilai inti terjadi ketika perilaku yang tidak dapat diterima ditampilkan. Bajovic et al (2009) menyoroti masalah implementasi pendidikan karakter antara lain. kurangnya kejelasan dalam mendefinisikan 'karakter',

kurangnya pengakuan akan pentingnya kognitif dan social proses dalam pengembangan moral, dan kurangnya kejelasan dalam strategi yang efektif untuk pengembangan karakter.

Penelitian mengenai manajemen pendidikan karakter yang diperlukan untuk membangun kerangka kerja strategis, fungsional dan operasional belum banyak dilakukan Hollingshead (2009) mengemukakan tentang manajemen yang berfokus pada prinsip dan strategi *concerns-based adoption model* (CBAM) yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran akan proses perubahan selama tahun pertama implementasi pendidikan karakter di sekolah. Hasnidar & Elihami (2019) melakukan penelitian tentang manajemen pendidikan karakter di tingkat taman kanak-kanak. Keberhasilan manajemen pendidikan karakter terletak pada lingkungan dengan beberapa strategi pembelajaran untuk anak-anak, yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Tiga pusat pendidikan di mana satu sama lain saling terkait dan saling mendukung untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pendidikan. Manajemen pendidikan karakter focus untuk mengintegrasikan penyelenggaraan ketiga unit pendidikan agar saling menunjang. Graff (2012) menegaskan hasil tinjauan literatur menunjukkan adanya kebutuhan untuk mempelajari pendidikan karakter di tingkat akademik yang lebih tinggi, khususnya sekolah dasar dan menengah. Ditegaskan tema-tema penelitian pendidikan karakter adalah 1) sejarah pendidikan karakter, 2) dampak pendidikan karakter terhadap kekerasan sekolah. 3) tujuan pendidikan karakter. meningkatkan akademisi dan perilaku siswa, mengurangi kekerasan dan intimidasi, dan menanamkan nilai-nilai 4) program pendidikan karakter ke sekolah. 5) Tema utama kelima membahas kekuatan dan kelemahan terkait dengan penerapan program pendidikan karakter. 6) target perkembangan untuk pendidikan karakter. 7) membahas peran konselor sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan karakter. Belum banyak yang membahas mengenai sistem manajemen dalam pendidikan karakter guna memastikan bahwa tujuan, program, keterlibatan konselor, kepala sekolah maupun guru serta alokasi sumber daya dirancang dengan penrencanaan guna pengorganisasian yang efektif.

Rois Abdul Fatah, 2021

MODEL MANAJEMEN PENDIDIKAN KARAKTER SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BERBASIS BOARDING SCHOOL DITINJAU DARI ETHICAL LEADERSHIP, TEACHER CAPACITY BUILDING DAN SCHOOL CULTURE

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Beberapa penelitian telah dilakukan antara lain Abdi (2018) yang mengembangkan model pendidikan karakter berdasarkan nilai-nilai agama, pengembangan program layanan masyarakat serta aktivitas keagamaan yang melibatkan siswa dengan masyarakat. Temiz (2019) mengembangkan model rencana pelajaran pendidikan karakter berdasarkan domain afektif yang didasarkan oleh Krathwohl, Bloom dan Masia (1973) dan sebelas prinsip pendidikan karakter efektif. Model pendidikan karakter terbatas pada tingkat kelas dan mata pelajaran yang terkait serta hanya melibatkan guru dan siswa dalam perancangannya. Sumarni et al (2015) mengembangkan model pendidikan karakter berbasis penguatan modal sosial. Model ini disusun mengacu pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits dan konsep modal sosial yang melekat pada karakteristik pribadi. Implementasi model ini adalah peningkatan aktualisasi nilai karakter siswa. Juniantari et al (2019) memperluas model pendidikan karakter dengan mengintegrasikannya pada pembelajaran matematika dasar. Tahap model pendidikan karakter dikembangkan adalah (1) investigasi pendahuluan, (2) desain, (3) realisasi / konstruksi, (4) pengujian, evaluasi, dan revisi, dan (5) implementasi. Fokus utama pembentukan karakter adalah *thinking skill*, *emotional skill*, *sport activity* dan *feeling*.

Pada umumnya penelitian pendidikan karakter fokus pada model yang diimplementasikan di dalam kelas artinya pengelolaan lebih fokus pada skala mikro yaitu kelas. Penelitian yang telah dilakukan tentang tata kelola pendidikan karakter masih belum menyeluruh dan bersifat parsial sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen yang menjadi masalah. Mengenai model tata kelola pendidikan sekolah *boarding school*, secara umum Huda et al (2020) menjelaskan tiga pendekatan dalam pendidikan boarding school berdasarkan konstruksi yang terus berkembang dan dikembangkan sesuai dengan kondisi individu dan masyarakat, serta upaya menyaingi konsep pendidikan patriarkal barat dan hedonism. Tiga landasan filosofi yang dijadikan sebagai dasar untuk pengembangan *boarding school* yaitu berbasis *theologis*, *rational based*, *positive based*.

Rois Abdul Fatah, 2021

MODEL MANAJEMEN PENDIDIKAN KARAKTER SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BERBASIS BOARDING SCHOOL DITINJAU DARI ETHICAL LEADERSHIP, TEACHER CAPACITY BUILDING DAN SCHOOL CULTURE

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Diperlukan penelitian yang bersifat menyeluruh pada fungsi-fungsi manajemen untuk memecahkan masalah-masalah penyelenggaraan pendidikan karakter seperti di Indonesia yang cukup kompleks. Sumber-sumber nilai untuk pendidikan karakter belum dikelola secara efektif. Program pendidikan karakter yang selama ini diselenggarakan lebih fokus pada guru dan belum dikelola guna melibatkan orang tua maupun masyarakat serta lebih focus pada sistem hafalan tentang teori moral dibandingkan mengajak untuk mengargumentasikan alasan moral.

Berkaca dari fenomena persoalan pendidikan di atas, konsep pendidikan karakter dan implementasi manajerial menjadi menarik untuk diteliti terlebih bila ditelaah bagaimana penerapan dan pengelolaan pendidikan karakter di pendidikan formal (*Boarding school*). Upaya mengoptimalkan implementasi pendidikan karakter dengan focus pada *moral reasoning* di tingkat SMP memerlukan kerangka konseptual yang sesuai dengan karakteristik serta kondisi di lapangan. Pemenuhan kebutuhan terhadap keberadaan sistem yang dapat menopang tata kelola untuk penyelenggaraan pendidikan karakter di lembaga pendidikan lebih focus pada model atau pengelolaan di dalam kelas. Untuk penyelenggaraan pendidikan karakter diperlukan. Anggraini dan Kusniarti (2016) menunjukkan model implementasi pendidikan karakter di sekolah dasar dan menengah belum menarik banyak pihak dan bentuk evaluasinya belum dikembangkan secara berkelanjutan. Anggraini dan Kusniarti (2016) telah menunjukkan pentingnya penelitian mengenai fungsi manajemen yaitu implementasi dan evaluasi untuk mengoptimalkan pendidikan karakter.

Sekolah dituntut memiliki pedoman implementasi untuk membuat pendidikan lebih terorganisir dan berencana dengan focus pada *moral reasoning* sebagai masalah utama. Evaluasi harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan banyak pihak. Penerapan tata kelola manajemen pendidikan karakter yang ditelaah lebih pada fungsi implementasi dan evaluasi secara terbatas pada output bukan proses tata kelola maupun pada perencanaan.

Rois Abdul Fatah, 2021

MODEL MANAJEMEN PENDIDIKAN KARAKTER SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BERBASIS BOARDING SCHOOL DITINJAU DARI ETHICAL LEADERSHIP, TEACHER CAPACITY BUILDING DAN SCHOOL CULTURE

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan dalam pendidikan karakter serta menghasilkan model sesuai dengan tujuan pendidikan karakter secara menyeluruh. Penjelasan tentang efektivitas pendidikan karakter secara menyeluruh baik di level organisasi yaitu pimpinan maupun di level kelas yang dibuktikan dengan output berupa perilaku siswa yang berkarakter diperlukan. Hasil penelitian tentang efektivitas pendidikan karakter dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengembangkan model pendidikan karakter yang sesuai dengan karakteristik sekolah. Persoalan-persoalan terkait tata kelola yang efektif dalam pendidikan karakter sulit untuk dipecahkan tanpa adanya kerangka kerja berupa teori yang relevan. Sekolah memerlukan kerangka kerja manajemen pendidikan karakter yang bersifat konseptual, menyeluruh dan praktis untuk penyelenggaraan pendidikan karakter diperlukan guna menghasilkan model yang sesuai dengan tujuan pendidikan karakter.

Perancangan model pendidikan karakter di tinjau dari *Ethical Leadership, Teacher Capacity Building dan School Culture*. Dengan focus pada masalah utama yaitu lemahnya moral reasoning siswa dalam mengargumentasikan pilihan moral. model dinilai dapat memecahkan melalui proses interaksi diantara variable tersebut untuk menjamin adanya refleksi kritis siswa terhadap karakter. Upaya untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengargumentasikan pilihan karakter (*moral reasoning*) memerlukan model (kepemimpinan), dukungan pada proses (TCB), latihan dan kebiasaan untuk berkomunikasi tentang pilihan moral secara bebas dan tanpa tekanan serta dogmatisme.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mendalami model manajemen pendidikan karakter pada tingkat Sekolah Menengah Pertama berbasis *boarding school* di Jawa Barat ditinjau dari *ethical leadership, teacher capacity building dan school culture*.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian secara umum bagaimana model manajemen pendidikan karakter pada tingkat Sekolah Menengah Pertama berbasis boarding

Rois Abdul Fatah, 2021

MODEL MANAJEMEN PENDIDIKAN KARAKTER SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BERBASIS BOARDING SCHOOL DITINJAU DARI ETHICAL LEADERSHIP, TEACHER CAPACITY BUILDING DAN SCHOOL CULTURE

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

school ditinjau dari *ethical leadership*, *teacher capacity building* dan *School culture* di Sekolah Menengah Pertama berbasis *boarding school* Jawa Barat. Untuk itu dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan manajemen pendidikan karakter di Sekolah Menengah Pertama berbasis *boarding school* di Jawa Barat ditinjau dari *ethical leadership*, *teacher capacity building*, *school culture* dan output berupa karakter siswa?
2. Apakah *ethical leadership* berpengaruh terhadap karakter siswa melalui implementasi manajemen pendidikan karakter di Sekolah Menengah Pertama berbasis *boarding school* di Jawa Barat?
3. Apakah *teacher capacity building* berpengaruh terhadap karakter siswa melalui implementasi manajemen pendidikan karakter di Sekolah Menengah Pertama berbasis *boarding school* di Jawa Barat?
4. Apakah *School culture* memiliki pengaruh terhadap karakter siswa melalui implementasi manajemen pendidikan karakter di Sekolah Menengah Pertama berbasis *boarding school* di Jawa Barat?
5. Bagaimana model manajemen pendidikan karakter di Sekolah Menengah Pertama berbasis *boarding school* di Jawa Barat?
6. Bagaimana dampak implementasi model manajemen pendidikan karakter di Sekolah Menengah Pertama berbasis *boarding school* di Jawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Terdeskripsikannya pelaksanaan manajemen pendidikan karakter di Sekolah Menengah Pertama berbasis Boarding di Jawa barat ditinjau dari *ethical leadership*, *teacher capacity building*, *school culture* dan output berupa karakter siswa
2. Teranalisisnya pengaruh *ethical leadership* terhadap karakter siswa melalui implementasi manajemen pendidikan karakter di Sekolah Menengah Pertama berbasis *boarding school* di Jawa Barat.

Rois Abdul Fatah, 2021

MODEL MANAJEMEN PENDIDIKAN KARAKTER SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BERBASIS BOARDING SCHOOL DITINJAU DARI ETHICAL LEADERSHIP, TEACHER CAPACITY BUILDING DAN SCHOOL CULTURE

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3. Teranalisisnya pengaruh *teacher capacity building* terhadap karakter siswa melalui implementasi manajemen pendidikan karakter di Sekolah Menengah Pertama berbasis *boarding school* di Jawa Barat.
4. Teranalisisnya pengaruh *school culture* terhadap karakter siswa melalui implementasi manajemen pendidikan karakter di Sekolah Menengah Pertama berbasis *boarding school* di Jawa Barat.
5. Terumuskannya model manajemen pendidikan karakter sesuai dengan masalah utama *moral reasoning* di Sekolah Menengah Pertama berbasis *boarding school* di Jawa Barat?
6. Teranalisisnya dampak implementasi model Manajemen pendidikan karakter di Sekolah Menengah Pertama berbasis *boarding school* di Jawa Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoretik dan praktis.

1. Manfaat Teoretik

Secara teoretik penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan keilmuan dalam bidang manajemen pendidikan dan secara khusus manajemen pendidikan karakter. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pimpinan yayasan, pimpinan sekolah, guru, dan seluruh warga sekolah, bahkan para pemerhati pendidikan tentang pedoman pelaksanaan manajemen pendidikan karakter.

1.5 Struktur Organisasi Disertasi

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai hal-hal yang diuraikan pada penelitian ini, penulisan penelitian terbagi ke dalam 5 bab yaitu

Rois Abdul Fatah, 2021

MODEL MANAJEMEN PENDIDIKAN KARAKTER SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BERBASIS BOARDING SCHOOL DITINJAU DARI ETHICAL LEADERSHIP, TEACHER CAPACITY BUILDING DAN SCHOOL CULTURE

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Bab I dijelaskan mengenai latar belakang penelitian berupa efektivitas Implementasi pendidikan karakter serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi manajemen pendidikan karakter di provinsi Jawa Barat, signifikansi penelitian ditinjau dari teori, perumusan dan tujuan penelitian serta manfaat hasil penelitian baik secara teori, praktis maupun untuk pengambilan kebijakan pendidikan karakter pemerintah daerah Jawa Barat.

Bab II terdiri dari penjelasan mengenai variabel penelitian baik konsep, dimensi maupun indikator variabel penelitian yaitu *ethical leadership*, *teacher capacity building*, budaya sekolah, implementasi dan output berupa karakter siswa. Riset terdahulu dipaparkan untuk menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pemaparan tersebut dituangkan dalam rerangka berpikir penelitian. Kemudian disusun pengembangan dan pernyataan hipotesis sesuai dengan tujuan penelitian yang akan diuji dalam penelitian.

Bab III terdiri dari pemilihan metode, alasan dan bagaimana praktek penelitiannya. Pemaparan definisi operasional, dimensi dan pengukuran yang akan dijadikan sebagai dasar untuk menyusun kuesioner. Penjelasan mengenai populasi, teknik penarikan sampel, serta teknik pengumpulan dan analisis data dengan menggunakan SEM berbasis covariant.

Bab IV analisis data terdiri dari deskripsi mengenai variabel penelitian, serta uji hipotesis dengan menggunakan pendekatan SEM (*Structural Equation Modeling*) sesuai dengan hipotesis yang disusun di bab 2. Diskusi temuan penelitian dibandingkan dengan penelitian terdahulu.

Bab V terdiri dari kesimpulan, implikasi teoritical dan manajerial, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian, implikasi penelitian baik secara teori tentang implementasi pendidikan karakter dilihat dari faktor yang mempengaruhinya yaitu *ethical leadership*, *teacher capacity building*, *school culture* serta cakupan penelitian serta penelitian selanjutnya.